

BENGKULU; SEBELUM DAN SESUDAH TRAKTAT LONDON

Nina Herlina

Guru Besar Ilmu Sejarah di Departemen Sejarah & Filologi Universitas Padjadjaran

Email: nina.herlina@unpad.ac.id

ABSTRAK. Wilayah Bengkulu memiliki dinamika sejarah yang berbeda dengan wilayah Nusantara lainnya. Semula seperti daerah-daerah lain di Nusantara, di Bengkulu ada beberapa kerajaan yang tersebar di berbagai bagian Bengkulu yaitu Manjuto (di Muko Muko), Pinang Berlapis (di Ketahun), Serdang (di Lais), Sungai Lemau (di daerah Pondok Kelapa), Sungai Serut (di Bengkulu), Selebar (di daerah Selebar), Empat Petuali (di Rejang Lebong), dan Serawai (di Manna & Bintuhan, Bengkulu Selatan)..Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perubahan terjadi terutama setelah Bengkulu jatuh ke tangan Inggris (EIC), sejak 1685 hingga th 1824 lahir Traktat London. Traktat ini intinya adalah tukar guling wilayah jajahan kedua negara. Inggris menyerahkan Fort Marlborough di Bengkulu dan semua kepemilikannya di Sumatera kepada Belanda dan Belanda menyerahkan semua perusahaan di India yang telah berdiri sejak 1609. Belanda juga menyerahkan Kota dan Benteng Malaka kepada Inggris dan Inggris menarik pasukannya dari daerah Belitung dan menyerahkan Belitung kepada Belanda. Selain itu, Belanda menarik pasukannya dari Singapura dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan lahirnya traktat ini, Bengkulu jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda sehingga kondisi Bengkulu mengalami perubahan besar di berbagai bidang, kondisi ekonomi memburuk. Dan lebih jauh lagi ketika Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bengkulu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila Traktat London tidak pernah ada, mungkin Bengkulu menjadi bagian dari negara Persemakmuran Inggris.

Kata Kunci : 1.Konflik, 2.Traktat, 3. EIC 4 Perubahan.

BENGKULU: BEFORE AND AFTER THE TREATY OF LONDON

ABSTRACT. Bengkulu is a region whose historical dynamics differed from those of other regions in the Nusantara Archipelago. Like other regions in the archipelago, the Bengkulu area also consisted of several small kingdoms, namely Manjuto Kingdom (in Muko Muko) Pinang Berlapis Kingdom (in Ketahun). Serdang Kingdom (in Lais), Sungai Lemau (in Pondok Kelapa area), Sungai Serut Kingdom (in Bengkulu), Selebar Kingdom (in Selebar area), Empat Petuali Kingdom (in Rejang Lebong), and Serawai Kingdom (in Manna and Bintuhan, South Bengkulu). This article delves into the dynamics of the change occurring after Bengkulu had fallen into the hands of the British East India Company (EIC) in 1685 until the signing of the Anglo-Dutch Treaty (also known as the Treaty of London) in 1824. The primary subject of the treaty was the cession of territories between the two colonial powers. The British were to cede Fort Marlborough in Bengkulu and all the regions they were ruling in Sumatera to the Dutch. In exchange, the Dutch were to hand over all the companies already established and operating in India since 1609 to the British. In addition, the Dutch also had to surrender city and port of Malacca to the British. The study adopts a four-step historical method, which consists of heuristic, critical, interpretative, and historiographic steps. The results reveal that the Treaty caused the fall of Bengkulu to the hands of the Dutch Indies administration and that the event was followed by major changes in many aspects and, subsequently, a deteriorating local economy. Furthermore, following the Proclamation of the Independence of the Republic of Indonesia on 17 August 1945, Bengkulu became a part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Had the Treaty of London not taken place, Bengkulu might have remained a part of the British Commonwealth.

Keywords: Conflict, Treaty, EIC, Change

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu baru dibentuk pada 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967. Namun demikian, Bengkulu memiliki sejarah yang panjang, sejak masa prasejarah hingga masa sekarang. Secara astronomi, Provinsi Bengkulu terletak pada 5°40' – 2° 0' Lintang Selatan dan 40' – 104° 0' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 19.788.70 km² (7,640,46). Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Sumatera Barat (Utara), Lampung (Selatan), Samudra Hindia (Barat), serta Jambi dan Sumatera Selatan (Timur).

Di Bengkulu pernah berdiri beberapa kerajaan merdeka sebelum kedaulatannya direbut oleh bangsa Barat. Ketika , pada 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan jalur perdagangan berubah dari Selat Malaka ke Pantai Barat Sumatera, di daerah Bengkulu tumbuh beberapa pelabuhan, yaitu Muko Muko, Selebar, Seluma, Manna, Bintuhan, dan Krui. Pada Abad XVI, daerah Bengkulu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten sehingga terjadi Islamisasi, khususnya daerah Bengkulu pedalaman. Namun demikian, persentuhan awal Bengkulu dengan Islam kemungkinan besar terjadi sebelum Banten menjelma menjadi pusat kekuasaan politik.

Kemungkinan besar, persentuhan dengan Islam terjadi ketika pesisir Bengkulu tumbuh menjadi pelabuhan-pelabuhan dalam jalur perdagangan baru (Pantai Barat Sumatera – Selat Sunda) setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis dan pedagang-pedagang dari Aceh bisa jadi pembawa Islam paling awal ke daerah Bengkulu (*Sejarah Daerah Bengkulu*, 1978/1979)

Pantai Barat Sumatera merupakan salah satu aktivitas perdagangan sejak abad XVI Masehi dan banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Barat. Inggris dan Belanda menunjukkan persaingan yang hebat di Pesisir Barat Sumatera untuk menguasai jalur perdagangan internasional. Bangsa lainnya adalah Prancis yang untuk pertama kalinya datang ke Pesisir Barat Sumatera, termasuk Bengkulu pada 1529. Prancis sempat menguasai Pesisir Barat Sumatera Abad XVIII, tepatnya 1760-1763. Persaingan bangsa-bangsa Eropa di Pesisir Barat Sumatera, akhirnya memunculkan Inggris dan Belanda sebagai penguasa di salah satu pusat aktivitas perdagangan itu. Belanda membangun pusat perdagangannya di Padang dan Inggris membangun pusat perdagangannya di Bengkulu (Asnan, 2012). Sejak 1825, Bengkulu secara resmi diserahkan Inggris kepada Kerajaan Belanda sehingga sejak saat itu menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Traktat London tahun 1824 (Ranni, 1993; Siddik, 1996).

Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sejarah Bengkulu sebelum lahirnya Traktat London dan apa dampak Traktat London terhadap Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957; Gottschalk, 1968). Tahap pertama, heuristik yaitu menelusuri dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoroborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi secara logis, kemudian direkonstruksi menjadi

historiografi tentang Bengkulu ; Sebelum dan Sesudah Traktat London.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual

Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari kata Bangkai dan Hulu yang bermakna “bangkai di hulu”. Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut maka tersohorlah sebutan Bangkaihulu yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Bangkahulu atau Bengkulu. Versi lain diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Ratu Agung Sungai Serut. Akan tetapi, lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak Dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak “Empang ka hulu” yang berarti hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata-kata tersebut maka lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu. Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut *Benkoelen* atau *Bengkulen*, dalam bahasa Inggris disebut *Bencoolen*, sementara dalam bahasa Melayu disebut Bangkahulu. Ada juga yang mengaitkan nama Bengkulu sebagai bentukan kata yang diambil dari Bahasa Melayu, yaitu “Bang” yang berarti pesisir dan “Kulon” yang berarti barat. Bangkulon kemudian berubah pelapalannya menjadi Bengkulu. Sumber lain menyatakan bahwa “Bencoolen” (Bahasa Inggris) diperkirakan diambil dari sebuah nama bukit Ben Cullen yang terletak di Skotlandia. Akan tetapi, penamaan ini kurang berdasar karena tidak sesuai dengan tabiat bangsa Melayu yang tidak pernah memberikan nama suatu wilayah dari nama di luar wilayah budayanya (<https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/>).

Wilayah Bengkulu yang tadinya sepemuhnya merdeka di bawah kerajaan-kerajaan mandiri, mengalami perubahan di berbagai bidang setelah Bangsa Eropa datang bergantian sebagai penjajah. Perubahan yang nyata tentu saja menyangkut status kerajaan-kerajaan, yang tadinya merdeka menjadi bersubordinasi kepada penjajah. Pengaruh Barat tampak dalam berbagai aspek sosial budaya,

terutama dalam bentuk seni bangun(arsitektur) seperti tampak pada peninggalan bangunan-bangunan masa kolonial yang masih berdiri hingga kini. Pengaruh dalam tata perdagangan juga jelas, di mana pribumi tunduk kepada aturan-aturan yang ditegakkan kompeni asing.

2. Bengkulu Dalam Lintasan Sejarah

Pada masa prasejarah, diperkirakan bahwa Bengkulu merupakan daerah lalu lintas migrasi sehingga pada masa itu, daerah Bengkulu kemungkinan sudah dihuni oleh manusia purba. Setelah masa prasejarah, menurut *Tambo* (salah satu bentuk historiografi tradisional), di Bengkulu pernah terdapat beberapa kerajaan, yaitu Manjuto (di Muko Muko), Pinang Berlapis (di Ketahun), Serdang (di Lais), Sungai Lemau (di daerah Pondok kelapa), Sungai Serut (di Bengkulu), Selebar (di daerah Selebar), Empat Petuali (di Rejang Lebong), dan Serawai (di Manna & Bintuhan, Bengkulu Slatan). Pada Abad XIII – Abad XVI, di Bengkulu terdapat dua kerajaan penting, yaitu Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar (*Sejarah Daerah Bengkulu*, 1978/1979; Siddik, 1996)

Bengkulu di Bawah EIC

Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa telah mendorong mereka sampai ke dunia timur, dunia yang menjadi penghasil rempah-rempah. Di antara bangsa Eropa yang pernah melakukan perdagangan dan juga aktivitas politik adalah bangsa Inggris yang pertama kali singgah di Bengkulu pada 1647. British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. *Bencoolen/Coolen* yang berasal dari bahasa Inggris *Cut Land* yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan.

Tahun 1701, bangsa Inggris di perbentengannya pertama, Fort York (Pasar Bengkulu) menyadari bahwa letak benteng itu tidak strategis untuk pertahanan serta tidak sehat keadaan sekelilingnya. Karena itu kemudian mereka memilih Tapak Paderi (dahulu penduduk Bengkulu menamakannya : Ujung Karang) sebagai lokasi untuk mendirikan gudang bagi

Kompeni. Tahun 1714, dekat pergudangan Ujung Karang itu pula, mereka membangun kompleks perbentengan yang kokoh dan amat termashur, yakni Fort Marlborough. (Dalip dkk., 1983/1984).



Benteng Marlborough Tahun 1900

Sumber : Fort Marlborough te Benkoelen. Collectie KITLV – Universiteitsbibliotheek Leiden

Pada tahun 1719 terjadilah pemberontakan rakyat Bengkulu. Salah seorang pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Mangku Raja dari Kerajaan Sungai Lemau. Pemberontakan tahun 1719 itu berkaitan dengan perjanjian 1695. Dalam perjanjian tahun 1695 itu dimuat perjanjian khusus untuk Pangeran Selebar, di mana ditentukan bahwa tunjangan yang diberikan kepada putera raja apabila menggantikannya akan diberikan apabila menunjukkan sikap yang tetap setia kepada Inggris. Tatkala merica di wilayah Kerajaan Selebar mengalami musim paceklik, Inggris menganggapnya sebagai pengingkaran perjanjian (Dalip dkk., 1983/1984).



Benteng Marlborough Tahun 1936

Sumber : Fort Marlborough te Benkoelen. Collectie KITLV – Universiteitsbibliotheek Leiden



Benteng Marlborough Saat Ini

Sumber : Dokumentasi Pemprov Bengkulu

Konflik di Eropa

Dalam kurun waktu 1756-1763, terjadi peperangan antara Inggris dan Prancis untuk memperebutkan dominasi global. Peperangan tersebut melibatkan banyak negara yang pada akhirnya mempengaruhi banyak peristiwa besar secara global di kemudian hari. Oleh karena itu, perang ini sering disebut sebagai Perang Besar pertama, yang terjadi sekitar 160 tahun sebelum Perang Dunia I. Perang tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan setelah Perang Suksesi Austria. Prusia ingin memperluas dominasinya di Eropa dan di lain pihak, Austria ingin merebut kembali Silesia yang direbut oleh Prusia. Pada waktu bersamaan, tentara Inggris, Prancis, dan Spanyol terlibat dalam peperangan untuk memperebutkan daerah jajahan di daerah Amerika Utara dan Kepulauan Karibia. Dampaknya, terbentuklah dua persekutuan pada 1756, yaitu persekutuan Inggris dan Prusia serta persekutuan Prancis, Austria, dan Rusia (Marston, 2001).

Perang tujuh tahun di Eropa menyebar ke wilayah lain, terutama di wilayah jajahan negara-negara yang terlibat peperangan. Wilayah jajahan Inggris di Asia Selatan dan Asia Tenggara, mendapat serangan dari Prancis. Demikian juga dengan Bengkulu sebagai salah satu wilayah yang dikuasai oleh Inggris mendapat serangan gencar dari Prancis yang dilakukan sejak 13 Maret 1760 (Ranni, 1993; Siddik, 1996). Armada Prancis yang dipimpin Comte d'Estaing dengan mudah menguasai Pantai Barat Sumatera dan dapat menguasai Fort Marlborough sebagai pusat perdagangan Inggris di Pantai Barat Sumatera (Asnan, 2012).

Akhir kekuasaan Prancis di Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik di Eropa. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Tujuh Tahun mengakhiri peperangan itu dengan menandatangani empat perjanjian, salah satunya Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh tiga negara yaitu Inggris, Prancis, dan Spanyol pada 10 Februari 1763. Lewat perjanjian ini, Prancis menyerahkan semua jajahannya di India kepada Inggris, termasuk daerah Keresidenan Bengkulu.



Lukisan Comte d'Estaing

Sumber : *Prancis Ganyang Inggris di Bengkulu*.
Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/prancis-ganyang-inggris-di-bengkulu/>.
Tanggal 2 November 2022. Pukul 21.57 WIB

Meskipun Perang Tujuh Tahun telah berakhir pada 1763, tetapi konflik Inggris dan Belanda dengan Prancis di Eropa tidak pernah berhenti secara permanen. Dalam hal ini, Hindia Belanda menjadi salah satu wilayah konflik Inggris dan Belanda sampai akhirnya pada 1811, Inggris berhasil menguasai Jawa dari tahun 1811-1816 di bawah kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa (Ricklefs, 2007).

Dengan dikuasainya Pulau Jawa, Inggris tidak begitu memperhatikan Bengkulu karena Gubernur Jendral EIC di Calcutta, Lord Minto, memandang Pulau Jawa lebih strategis bagi upaya Inggris memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Inggris berkuasa di Pulau Jawa hanya lima tahun (1811-1816) karena berdasarkan *London Treaty* atau *Verdrag van Londen* (Perjanjian London) yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814, Inggris berkewajiban menyerahkan kembali wilayah jajahan Belanda yang pernah direbut atau dikuasai oleh Prancis. Setelah Pulau Jawa, Maluku, dan daerah lainnya di Nusantara diserahkan kembali ke Belanda, Inggris kembali menjadikan Bengkulu sebagai pusat aktivitas ekonomi dan politik mereka di Nusantara. Bengkulu tidak diserahkan kepada Belanda karena Bengkulu merupakan daerah kekuasaan Inggris yang tidak direbut dari Prancis atau Belanda (Jeekel, 1881; Ranni, 1993).

Konflik Inggris dan Belanda dengan Prancis di Eropa memberikan dampak cukup signifikan bagi Bengkulu, khususnya di bidang ekonomi. Dengan dijadikannya Pulau Jawa

sebagai pusat perdagangan Inggris di Hindia Belanda, mengakibatkan daerah Bengkulu menjadi terbelengkalai. Keadaan ini terjadi sampai tahun 1818 seiring dengan pengangkatan Raffles sebagai Gubernur Bengkulu.

Kemudian Inggris dan Belanda terlibat dalam persaingan memperebutkan hegemoni di sepanjang Pesisir Barat Sumatera. Belanda melalui kamar dagangnya (VOC) mendirikan loji sekaligus pusat politik dan ekonomi di Padang. Sementara itu, Inggris menjadikan Bengkulu sebagai pusat aktivitas perdagangan dan politiknya. Sejak 1795, Inggris menjadi penguasa Pesisir Barat Sumatera setelah mengambil alih Padang dari VOC. Sejak saat itu, Pesisir Barat Sumatera memasuki periode yang dikenal sebagai fase *interregnum Inggris*. Dominasi Inggris di Pesisir Barat Sumatera berakhir pada 1819 seiring dengan penyerahan kembali wilayah-wilayah yang dulu dikuasai VOC berdasarkan hasil Kongres Wina tahun 1815 (Asnan, 2012; van Vuuren, 1916-1917).

Traktat London Tahun 1824

Berdasarkan *Anglo-Dutch Treaty* (1814), Inggris menyerahkan Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Nusantara kepada Belanda pada 1816. Sejalan dengan itu, Inggris kembali ke Bengkulu dan menjadikan daerah itu sebagai pusat aktivitas perdagangannya di wilayah Asia Selatan dan Pesisir Barat Sumatera. Pada 1818, Inggris mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Bengkulu. Saat menginjakkan kakinya di Bengkulu, kondisi hancur akibat tidak terurus oleh EIC dan diperparah oleh bencana gempa bumi. Sebagai letnan gubernur, Raffles harus membangun kembali Bengkulu yang akan dijadikan sebagai pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk mendukung usahanya itu, Raffles mengadakan perjanjian politik dengan beberapa penguasa lokal, antara lain dengan Pangeran Lenggeng Alam dari Kerajaan Sungai Lemau pada 4 Juli 1818. Selain itu, para penguasa lokal yakni Sultan Mukomuko, Pangeran Sungai Lemau, dan Pangeran Sungai Itam dijadikan sebagai pejabat pemerintahan kolonial Inggris. Kebijakan lainnya adalah menghapus sistem tanam paksa lada dan mengembalikan wewenang kepala masyarakat hukum adat sesuai hukum adat sepanjang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi Inggris. Raffles pun mulai mempromosikan kembali penanaman kopi dalam kurun waktu 1818-1820 sehingga pada 1824 sekitar setengah juta pohon kopi telah tumbuh dengan baik di berbagai distrik di Bengkulu. Pada akhirnya, Raffles berhasil membangun Kota

Bengkulu sebagai pusat aktivitas politik dan ekonomi. Kota Bengkulu dihuni oleh berbagai etnis, antara lain Melayu, Eropa, Cina, India, dan Bugis. Raffles pun membuka sekolah dan membangun fasilitas kesehatan. Di bawah Raffles, Bengkulu tumbuh sebagai wilayah penting dan menjadi pelabuhan bebas bagi jalur perdagangan Asia Selatan - Asia Tenggara - Asia Timur (Bastin, 1965; Siddik, 1996).

Meskipun Inggris menguasai dan berhasil membangun kembali Bengkulu, tetapi persaingan dagang dengan Belanda di Asia Tenggara tidak pernah mereda. Persaingan tersebut yang kemudian mengantarkan kedua negara duduk di meja perundingan untuk mengamankan kepentingan mereka. Perundingan kedua negara menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Maret 1824 di London dan dikenal dengan sebutan Traktat London. Traktat yang ditandatangani Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Falck dari pihak Belanda serta George Canning dan Charles Watkin Williams Wynn dari pihak Inggris memuat 17 klausul dan beberapa klausul menyangkut pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris di Asia Tenggara dengan tujuan agar kepentingan perdagangan kedua negara di Asia Tenggara dapat berjalan dengan aman. Beberapa klausul dari Traktat London 1824 yang menyangkut pembagian wilayah kekuasaan antara lain sebagai berikut.

1. Inggris menyerahkan Fort Marlborough di Bengkulu dan semua kepemilikannya di Sumatera kepada Belanda.
2. Kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu Belanda, tetapi Aceh juga tidak boleh mengganggu keamanan di lautan. Inggris diberi akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, khususnya dengan Ambon, Banda dan Ternate.
3. Belanda menyerahkan semua perusahaan di India yang telah berdiri sejak 1609.
4. Belanda menyerahkan Kota dan Benteng Malaka serta setuju untuk tidak membuka kantor dagang di Semenanjung Malaya ataupun membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Inggris menarik pasukannya dari daerah Belitong dan menyerahkan Belitong kepada Belanda.
5. Belanda menarik pasukannya dari Singapura dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris. Inggris berjanji untuk tidak mendirikan kantor perwakilan di Kepulauan Karimun Jawa, Kepulauan Batam, Bintan, Lingga atau kepulauan lain di selatan Selat Singapura.

6. Semua pemindahan properti dan pendirian akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1825 dan sejumlah 100.000 poundsterling harus dibayar oleh Belanda di London sebelum akhir 1825 (Perjanjian Inggris dan Belanda. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbambi/perjanjian-inggris-dan-belanda/>. Tanggal 3 November 2022. Pukul 19.24 WIB; van der Kemp, 1903)

Dengan merujuk pada Traktat London 1824, Kerajaan Inggris secara resmi menyerahkan Bengkulu kepada Kerajaan Belanda pada 6 April 1825 dan sejak saat itu, penjajahan Inggris di Bengkulu berakhir (Dalip dkk., 1983/1984). Sejak 1824-1942 Daerah Bengkulu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda. Namun demikian, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi pemerintahannya di Bengkulu pada 1868. Pada 1878, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bengkulu sebagai keresidenan yang terpisah dari Sumatera Selatan. Pada 1942, Jepang merebut Bengkulu dari Pemerintah Hindia Belanda dan selama tiga tahun lebih, wilayah Bengkulu berada di bawah kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Bengkulu merupakan bagian integral dari NKRI dan sebagai salah satu keresidenan di wilayah Provinsi Sumatera.

Dampak Bagi Bengkulu

Traktat London memberikan dampak terhadap hegemoni Belanda di Nusantara. Seluruh wilayah Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya, sejak 1824 menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Sesuai dengan isi Traktat London, Inggris melalui EIC tidak dapat merongrong kekuasaan Belanda di Nusantara, termasuk di wilayah Sumatera. Melalui Traktat London, wilayah Bengkulu yang masuk ke dalam daerah Pesisir Barat Sumatera bagian Selatan, menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 1942 ketika Militer Jepang melakukan pendudukan atas wilayah Hindia Belanda dan sejak Maret 1942, Bengkulu berada di bawah Pemerintahan Militer Angkatan Darat Ke-25 yang berpusat di Bukittinggi (Sumatera Barat).

Pada saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, wilayahnya meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sehingga dengan sendirinya, Bengkulu menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Apabila Traktat London tidak ditandatangani dan Pesisir Barat Sumatera bagian Selatan tetap dikuasai Inggris, bisa jadi Bengkulu tidak akan menjadi bagian dari wilayah NKRI. Sebagai wilayah kekuasaan Inggris, bisa jadi Bengkulu menjadi sebuah negara merdeka bentukan Inggris seperti halnya Malaya (kemudian pecah menjadi Malaysia dan Singapura) atau Brunei Darussalam.

SIMPULAN

Betapa pentingnya, Traktat London bagi Bengkulu, terutama dampak politik serta masa depan Bengkulu sejak 1824. Sejarah Bengkulu dari masa EIC, Perancis, Belanda menunjukkan betapa Bengkulu menjadi wilayah penting dalam pergaulan internasional, khususnya perdagangan internasional yang menghubungkan pusat perdagangan di Asia selatan – Asia Tenggara – Asia Timur. Bengkulu menjadi pusat perdagangan Inggris dalam mengamankan kepentingan perdagangannya dan juga dalam upaya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Bila Traktat London tidak terjadi, mungkin Bengkulu bukan merupakan bagian dari NKRI, bahkan menjadi bagian negara persemakmuran Inggris.

DAFTAR PUSTAKA TERPILIH

- Asnan, Gusti. “Persaingan di Pantai Barat Sumatera” dalam Taufik Abdullah dan A. B. Lopian (eds.). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah. Jilid IV: Kolonisasi dan Perlawanan*. Jakarta: Ichtiar Varu van Hoeve.
- Bastin, John. 1965. *The British in West Sumatra*. Kualalumpur.
- Dalip, Achmaddin dkk. 1983/1984. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jeekel, L. J. P. J. 1881. *Het Sumatra-traktaat*. Dissertatie. Leiden; P. Somerwil.
- Van der Kemp, P. H. 1903. *Benkoelen; Krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824*.
- Marston, Daniel. 2001. *The Seven Years' War; Essential Histories*. Oxford: Osprey Publishing.
- Prancis Ganyang Inggris di Bengkulu. Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbambi/prancis-ganyang-inggris-di-bengkulu/>. Tanggal 2 November 2022. Pukul 21.57 WIB.

- Ranni, M.Z. 1993. *Perlawanan terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Siddik, Haji Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu, 1500-1990*. Jakarta: Balai Pustaka.